

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH GRATIS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

Amalia Amrina Rosyadah

07011381520078

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH GRATIS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

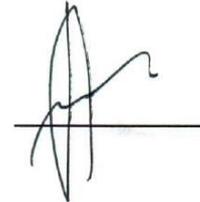
AMALIA AMRINA ROSYADAH

07011381520078

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

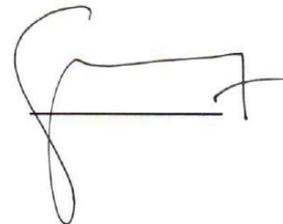
Pembimbing I

Dr. M. Husni Thamrin, M.si
NIP. 196406061992031001



Pembimbing II

Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH GRATIS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 5 Juli 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

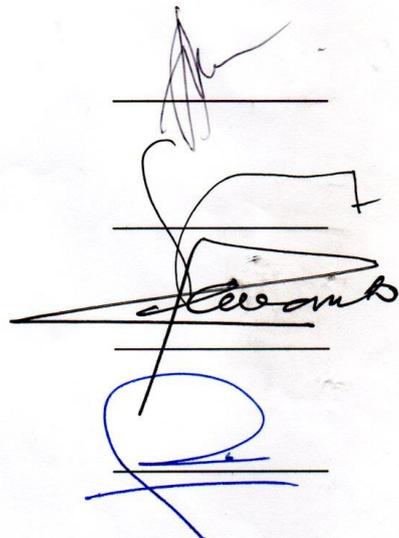
TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. M. Husni Thamrin, M.si
NIP. 196406061992031001
Ketua

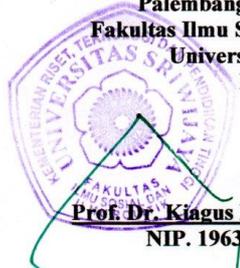
Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002
Anggota

Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003
Anggota

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003
Anggota



Palembang, Juli 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Kebijakan Publik Yang Terbaik Adalah Kebijakan Yang Berpijak Pada Kepentingan Rakyat dan Memberdayakan Masyarakat ”

- Riant Nugroho

Skripsi ini saya persembahkan, kepada :

- 1. Kedua orang tua Saya, Ayah dan Ibu.**
- 2. Seluruh dosen Administrasi Publik yang saya hormati**
- 3. Keluarga dan Sahabat Saya.**
- 4. Almamater Saya.**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan segala nikmat dan hidayah yang dilimpahkan kepada hamba-Nya, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Gratis Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Palembang” dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh derajat S-1 pada program Sarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah, Ibu, dan Keluarga tercinta, H. Ngadio, Hj. Yulia, Alm. Octa Vabiyanto, Agus Hari Wibowo, Dewi Indah, dan Ayu Ria Kandi atas doa dan dukungannya baik moril maupun materi serta limpahan kasih sayang, doa dan kesabarannya yang tiada putus selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si Sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Ibu Dwi Mirani, S.IP, M.Si, Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.
7. Bapak Dr.M.Husni Thamrin, M.si, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.S Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan nasihat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya kampus Palembang.
10. Bapak Awaluddin. S.Pd., M. Pd Selaku Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel beserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Administasi Publik Angkatan 2015 Kampus Palembang dan seluruh sahabat saya Elza Vernanda, Mikyal Marshalita, Alya Diibaj, Cindy Efsiara, Ade Okta, Eva Syafiera dan Putri yang telah sabar dan selalu mendukung saya

Semoga amal Bapak/Ibu, Saudara dan Teman-Teman akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah yang lebih baik sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Palembang, Juli 2019

Amalia Amrina Rosyadah

ABSTRAK

Kebijakan Program Sekolah Gratis merupakan program yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Program Sekolah Gratis, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di Provinsi Sumatera Selatan. Pada pelaksanaannya seluruh Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Palembang wajib mendapatkan dana program sekolah gratis. Pada pelaksanaan program sekolah gratis di tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Palembang belum adanya keterbukaan dana Program Sekolah Gratis yang di dapat, yang seharusnya dana tersebut dapat dilihat para siswa/siswi dengan jumlah penggunaan dana Program Sekolah Gratis di sekolah tersebut yaitu melalui papan pengumuman sekolah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Sekolah Gratis tingkat Sekolah Menengah Atas di kota Palembang. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Unit analisis yaitu SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 19 kota Palembang. data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara kepada key informant dan data sekunder melalui dokumen atau peraturan yang berkaitan tentang program sekolah gratis sumatera selatan. Skripsi ini menggunakan teori implementasi Charles O. Jones. Berdasarkan analisis dan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Gratis Tingkat SMA Negeri di Kota Palembang terutama di dua SMA Negeri yaitu SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 19 Palembang sudah cukup baik tetapi masih terdapat kelemahan hal ini dibuktikan dengan Jumlah pelaksana program sekolah gratis di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 19 sudah memadai dan juga sudah lengkapnya sarana prasaran yang ada di dinas maupun di SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 19 Palembang. Dan kelemahannya belum terbentuknya unit – unit kerja yang saling bekerjasama untuk melaksanakan program sekolah gratis di dinas pendidikan provinsi sumsel, adanya perbedaan dari SMA Negeri 15 yang tidak mendapatkan pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan program sekolah gratis sedangkan di SMA Negeri 19 sudah mendapatkannya. Saran yang dapat penulis berikan yaitu adanya pemberitahuan tentang program sekolah gratis yang dicantumkan di papan pengumuman sekolah penerima program sekolah gratis, dan Meningkatkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel kepada sekolah yang menerima dana PSG.

Kata kunci : Implementasi, Program Sekolah Gratis , Sekolah Menengah Atas

Pembimbing I


Dr. M. Husni Thamrin, M.si
NIP. 196406061992031001

Pembimbing II


Drs. Catot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002

Palembang, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

Free School Program Policy is a program that aims to ease the burden on parents / guardians of students through the release of the obligation to pay for school operational costs. As a technical guide for the implementation of the Free School Program, Governor Regulation Number 42 of 2017 concerning guidelines for the implementation of free school programs in South Sumatra Province. In its implementation, all State High Schools in Palembang are required to get free school program funding. In the implementation of the free school program at the State High School level in Palembang, there has been no openness of the Free School Program funds, which should be seen by the students with the amount of Free School Program funds used in the school through the school bulletin board. . The purpose of this study was to find out how the implementation of the Free High School School Program in Palembang. This thesis uses qualitative methods. The unit of analysis is 15 Public High Schools and 19 Public High Schools in Palembang. data obtained from primary data through interviews with key informants and secondary data through documents or regulations relating to the free South Sumatra school program. This thesis uses the implementation theory of Charles O. Jones. Based on the analysis and research in the field, it can be concluded that the Implementation of Free School Implementation Policies at State High Schools in Palembang City, especially in two State High Schools namely 15 Public High Schools and Palembang State High School 19 are good enough but there are still weaknesses as evidenced by the number of free school program implementers in the Education Office of the South Sumatra Province 15 High School and State Senior High School 19 already adequate and also the complete infrastructure available in the service and in the State High School 15 and Palembang State High School 19. And the weakness of the work units has not yet formed to work together to implement a free school program in the provincial education office in South Sumatra, there is a difference from SMA Negeri 15 which does not receive training and dissemination of free school programs while those in SMA 19 have already received it. Suggestions that can be given by the author are notification of free school programs listed on the school bulletin board recipients of free school programs, and Improving evaluation and monitoring carried out by the South Sumatra Provincial Education Office to schools that receive PSG funds

Keywords: Implementation, Free School Program, Senior High School

Advisor I


Dr. M. Husni Thamrin, M.si
NIP. 196406061992031001

Advisor II


Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002

Palembang, July 2019

Chairman of Public Administration Science Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	11
1. Kebijakan Publik	11
2. Konsep Implementasi Kebijakan	15
3. Teori Implementasi Kebijakan Publik	18
4. Kerangka Teori	22
5. Program.....	24
6. Sekolah Gratis	26
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pikiran	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Definisi Konsep.....	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis Dan Sumber Data	33
E. Informan Kunci	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Keabsahan Data	35
H. Teknik Analisis Data.....	39
I. Jadwal Penelitian	40
J. Sistematika Penulisan.....	41

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	43
2. Arti Lambang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	44
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	45
4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	47
5. Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	47
6. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	49
B. Analisis dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Gratis Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Palembang	58
1. Organisasi	59
2. Interpretasi	82
3. Penerapan	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 tata urutan kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan sekolah gratis...2	
Gambar . 2 Kondisi Pencapaian APK Dan APM Pendidikan Kota Palembang	4
Gambar . 3 Tahap – Tahap Pembuatan Kebijakan Publik	13
Gambar .4 Sekuensi Implementasi Kebijakan	16
Gambar .5 Tahapan Implementasi Kebijakan.....	17
Gambar. 6 Model Pendekatana <i>Framework For Policy Implementation Analysis Menurut Daniel Mazmanian And Paul Sabatier</i>	20
Gambar . 7 Model Pendekatan <i>Direct And Indirect Impact On Implementation</i> Menurut George C. Edward III.....	21
Gambar . 8 Bagan Kerangka Pemikiran	28
Gambar. 9 Lambang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	44
Gambar. 10 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.....	47
Gambar.11 Keputusan Gubernur Nomor 198/KPTS/DISDIK/	60
Gambar. 12 Struktur Organisasi SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 19 Palembang.....	62
Gambar. 13 wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pendidikan Prov Sumsel ...	68
Gambar.14 Persentase Tingkat Pendidikan Guru PNS , Pegawai PNS , Guru Tidak Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap di SMA Negeri 15 Palembang tahun 2017 – 2018	70
Gambar.15 Persentase Tingkat Pendidikan Guru PNS , Pegawai PNS , Guru Tidak Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap di SMA Negeri 19 Palembang tahun 2017 – 2018	71
Gambar.16 Rincian Dana Untuk Kegiatan Ekstra Kulikuler Siswa dan Pembayaran Tenaga Kependidikan Non PNS Di SMA Negeri 15 Palembang.....	73
Gambar.17 Wawancara Siswa Kelas XI SMA Negeri 19 Palembang.....	74
Gambar.18 Wawancara Guru SMA Negeri 15 Palembang	75
Gambar.19 Wawancara Guru SMA Negeri 19 Palembang	75
Gambar.20 Ruangn Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.....	76
Gambar. 21 Ruang Kelas , Ruangn Komputer, Ruang Tata Usaha dan Ruang Guru SMA	

Negeri 15 Palembang.....	77
Gambar. 22 Jumlah Ruang Kelas , Ruang Laboratorium, dan Ruang Perpustakaan , SMA Negeri 15 Palembang.....	78
Gambar. 23 Data Identitas SMA Negeri 15 Palembang	78
Gambar. 24 Ruang Kelas , Ruangan Tata Usaha, dan Ruang Guru SMA Negeri 19 Palembang.....	79
Gambar. 25 Jumlah Ruang Kelas , Ruang Laboratorium, dan Ruang Perpustakaan , SMA Negeri 19 Palembang.....	79
Gambar. 26 Data Identitas SMA Negeri 19 Palembang	80
Gambar. 27 Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	80
Gambar. 28 Lingkungan SMA Negeri 15 Palembang	81
Gambar.29 Lingkungan SMA Negeri 19 Palembang.....	81
Gambar. 30 Persentase Jumlah SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Kota Palembang yang ikut melaksanakan Program Sekolah	85
Gambar. 31 Wawancara Bendahara Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 15.....	87
Gambar. 32 Wawancara Bendahara Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 19.....	88
Gambar. 33 Pengumuman Daftar Sekolah Penerima Dana Program Sekolah Gratis dan Besarnya di Media Online.....	89
Gambar. 34 Papan Pengumuman SMA Negeri 15 Palembang.....	90
Gambar. 35 Papan Pengumuman SMA Negeri 19 Palembang.....	90
Gambar. 36 Pasal 50 pada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan	95

DAFTAR TABEL

Tabel .1 Jumlah SMA/SMK/MA Negeri Dan Swasta Di Kota Palembang Yang Ikut Melaksanakan Program Sekolah Gratis	6
Tabel.2 Nama – Nama Sma Negeri di Kota Palembang	7
Tabel. 3 Perbandingan Pendekatan <i>Top-Down</i> dan <i>Bottom-Up</i>	18
Tabel. 4 Perbandingan Penelitian Terdahulu	27
Tabel . 5 Fokus Penelitian.....	31
Tabel. 6 Tahapan-Tahapan Kegiatan Dalam Penelitian	40
Tabel.7 Tingkat Pendidikan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel tahun 2017 – 2018	69
Tabel.8 Nama – Nama SMA Negeri di Kota Palembang Yang Menerima Dana PSG	91
Tabel. 9 Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi mengenai organisasi Kebijakan penyelenggaraan sekolah gratis tingkat sekolah menengah atas negeri di kota Palembang	96
Tabel.10 Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi mengenai interpretasi Kebijakan penyelenggaraan sekolah gratis tingkat sekolah menengah atas negeri di kota Palembang.....	97
Tabel.11 Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi mengenai penerapan kebijakan penyelenggaraan sekolah gratis tingkat sekolah menengah atas negeri di kota Palembang.....	100
Tabel.12 Matriks Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Gratis Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Palembang.....	109

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PSG	: Program Sekolah Gratis
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
MA	: Madrasah Aliyah
PERDA	: Peraturan Daerah
TU	: Tata Usaha
SUMSEL	: Sumatera Selatan
PROV	: Provinsi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol
2. Surat Balasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Surat Balasan dari SMA Negeri 15 Kota Palembang
4. Surat Balasan dari SMA Negeri 19 Kota Palembang
5. Kartu Konsultasi Bimbingan Usulan Skripsi
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
8. Pedoman Wawancara
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan
10. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan
11. Keputusan Gubernur Nomor 198/Kpts/Disdik/2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, telah melaksanakan pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat Sumatera Selatan yaitu Program Sekolah Gratis (PSG).

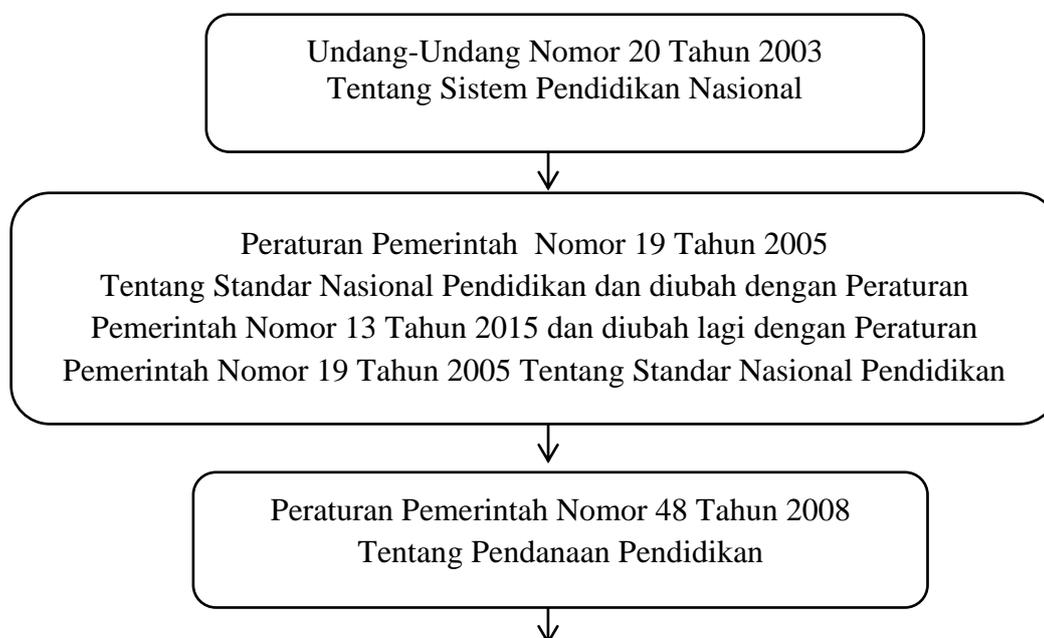
Program sekolah gratis merupakan program yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah yang telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Bab II Pasal 3. Dana program sekolah gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Besarnya dana *sharing* program sekolah gratis sebagaimana dihitung secara proporsional berdasarkan besaran jumlah siswa di setiap kabupaten/kota.

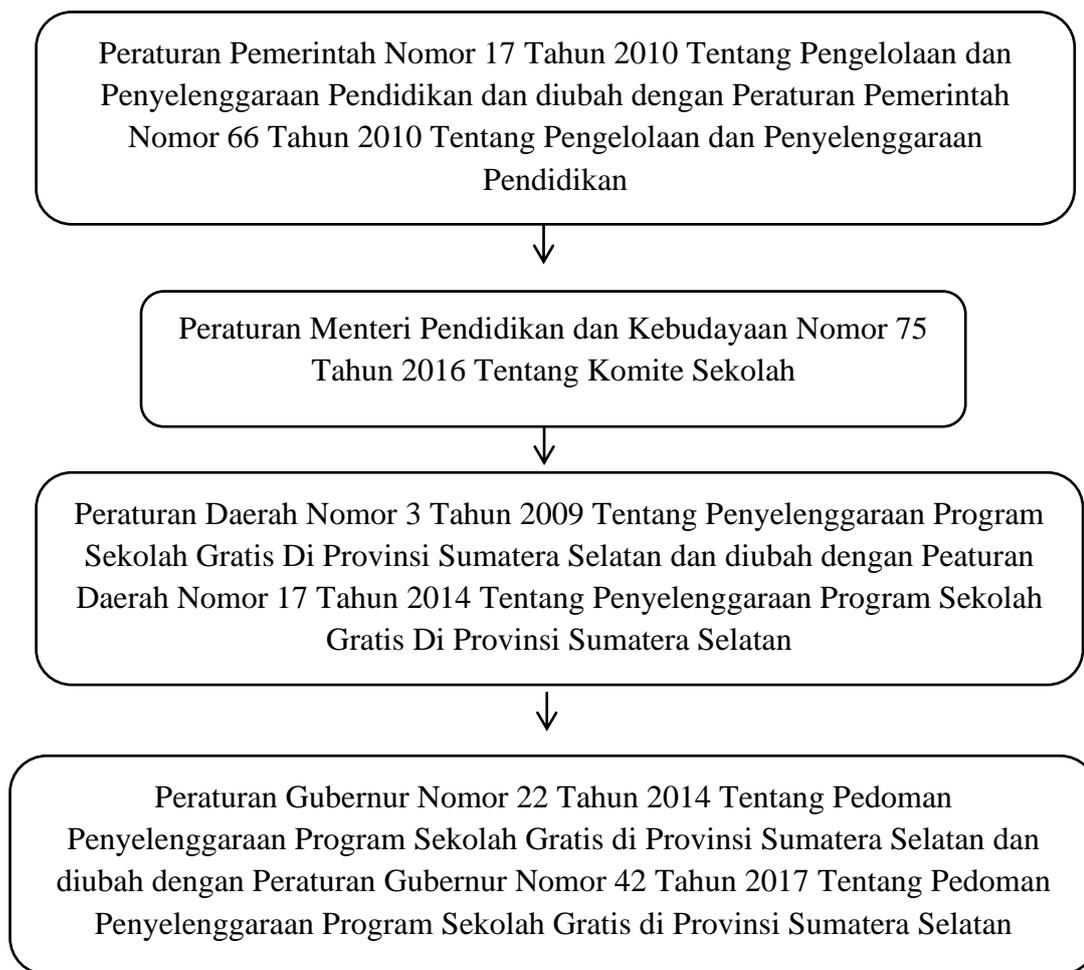
Sebagai dasar hukum pelaksanaan program sekolah gratis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Sumatera Selatan, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009.

Terbitnya peraturan daerah ini telah sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Program Sekolah Gratis, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa banyak aktivitas di sekolah yang dapat dibiayai oleh program sekolah gratis, oleh sebab itu penyaluran dana program sekolah gratis tidak boleh terlambat dalam setiap periode pencairannya. Berikut tata urutan kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan sekolah gratis :

Gambar. 1 Tata Urutan Kebijakan Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Sekolah Gratis





Sumber : diolah oleh penulis

Dalam melaksanakan program sekolah gratis setiap penyelenggara harus memperhatikan bahwa PSG merupakan sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, PSG harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa yang putus sekolah karena tidak mampu membayar sumbangan/pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan PSG harus menjamin mutu lulusan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Kota Palembang adalah salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang sudah dari awal ikut serta dalam melaksanakan kebijakan program sekolah gratis. Pelaksanaan kebijakan program sekolah gratis di Kota Palembang dilaksanakan pada tahun 2009 setelah diberlakukannya Perda dan Keputusan Gubernur yang berkaitan tentang penyelenggaraan program sekolah gratis pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota.

Pelaksanaan kebijakan program sekolah gratis di kota Palembang sudah berdampak cukup positif karena sudah ada perubahan pada angka putus sekolah pada tahun 2017 angka putus sekolah sebesar 0,75 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 1,02 persen. Walaupun persentasenya turun, jika dihitung dari total 300 ribu siswa, artinya masih ada sekitar 2250 anak di tingkat SMA yang putus sekolah. Kondisi pencapaian APK dan APM dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar.2 Kondisi pencapaian APK dan APM Pendidikan Kota Palembang



Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id

Pelaksanaan Program Sekolah Gratis di Kota Palembang , dilaksanakan oleh SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta, tetapi seluruh SMA Negeri di kota Palembang wajib mendapatkan dana PSG yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 42

Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 1 yaitu semua sekolah negeri wajib menerima dana PSG, dana PSG tersebut diberikan bukan hanya untuk siswa miskin tetapi seluruh siswa yang bersekolah di sekolah negeri mendapatkannya, dana PSG tersebut tidak diberikan langsung kepada siswa tetapi pihak sekolah yang mengaturnya untuk operasional sekolah. Dana PSG juga diberikan ke sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang ada di masing – masing sekolah di kota Palembang.

Dana PSG diberikan langsung dari tim manajemen Provinsi kepada pihak sekolah dan pihak sekolah menyalurkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan. Tata tertib pengelolaan Program Sekolah Gratis dilaksanakan pada tingkat tim manajemen Provinsi, tim manajemen Kabupaten/Kota dan tim manajemen sekolah SMA/SMK/MA. Adapun tata tertib pengelolaan tim manajemen sekolah, yaitu :

1. Tim manajemen sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a) Menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa, b) Melaksanakan penyelenggaraan PSG sesuai pedoman pelaksanaan dan arahan tim manajemen, c) Mengadakan evaluasi penyelenggaraan PSG , d) Melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan PSG sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tim manajemen sekolah dilarang melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.
3. Pengelolaan dana PSG dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mengumumkan besaran dana PSG yang diterima di papan pengumuman sekolah.
4. Tim manajemen sekolah tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah, baik yang berasal dari dana program sekolah gratis maupun dari sumber lain.

Berikut tabel jumlah sekolah SMA/SMK/MA baik Swasta maupun Negeri yang ikut melaksanakan Program Sekolah Gratis di Kota Palembang.

Tabel. 1 Jumlah SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Kota Palembang yang ikut melaksanakan program sekolah gratis

No.	Pendidikan	Tahun
		2017- 2018
1.	SMA Negeri	23
2.	SMA Swasta	81
3.	MA Negeri	3
4.	MA Swasta	15
5.	SMK Negeri	9
6.	SMK Swasta	85

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya perubahan jumlah sekolah dari tahun 2017-2018 SMA Negeri di Kota Palembang ada 23 sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis, SMA Swasta di Kota Palembang ada 81 sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis, MA Negeri di Kota Palembang ada 3 sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis, MA Swasta di Kota Palembang ada 15 sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis, SMK Negeri di Kota Palembang ada 9 sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis, dan SMK Swasta di Kota Palembang ada 85 sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis. Berikut nama – nama Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di kota Palembang :

Tabel. 2 Nama – Nama SMA Negeri di Kota Palembang

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Kecamatan
1	SMA Negeri 1 Palembang*	1.334	Iilir Barat 1
2	SMA Negeri 2 Palembang	1.090	Iilir Barat 1
3	SMA Negeri 3 Palembang*	1.233	Kemuning

4	SMA Negeri 4 Palembang*	881	Plaju Ulu
5	SMA Negeri 5 Palembang*	924	Iilir Timur II
6	SMA Negeri 6 Palembang*	1.044	Kemuning
7	SMA Negeri 7 Palembang	813	Kalidoni
8	SMA Negeri 8 Palembang*	1.042	Seberang Ulu II
9	SMA Negeri 9 Palembang	1.177	Kertapati
10	SMA Negeri 10 Palembang	1.441	Iilir Barat 1
11	SMA Negeri 11 Palembang	1.401	Iilir Barat 1
12	SMA Negeri 12 Palembang	699	Gandus
13	SMA Negeri 13 Palembang	1.167	Sukarami
14	SMA Negeri 14 Palembang	876	Sako
15	SMA Negeri 15 Palembang	620	Iilir Timur I
16	SMA Negeri 16 Palembang	920	Sako
17	SMA Negeri 17 Palembang*	1.199	Sukarami
18	SMA Negeri 18 Palembang*	893	Iilir Timur II
19	SMA Negeri 19 Palembang	1.275	Seberang Ulu I
20	SMA Negeri 20 Palembang	778	Gandus
21	SMA Negeri 21 Palembang	972	Sukarami
22	SMA Negeri 22 Palembang	1.082	Alang-alang Lebar
23	SMA Negeri Olahraga Sriwijaya Palembang	88	Seberang Ulu I

Keterangan * : sekolah unggulan

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 pada pasal 6 telah diatur bahwa (1) dana PSG diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tiga bulan yaitu : a. Periode Januari- Maret, b. periode April – Juni, c. periode Juli – September dan d. periode Oktober – Desember. (2) Penyaluran dana PSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada awal bulan setiap periode oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Dan besaran biaya PSG untuk SMA, MA, dan SMALB per siswa pertahun adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua jauta seratus ribu rupiah)

berasal dari dana BOS APBN sebesar RP. 1.400.000,- dan dana APBD Provinsi RP. 700.000,- . Dan setiap disalurkan secara periodik setiap tiga bulan satu siswa mendapatkan dana sebesar RP. 700.000,-

Dalam pelaksanaan program sekolah gratis, biaya yang meliputi pelaksanaan PSG yang telah disebutkan, jika berjalan dengan baik terhadap sekolah SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta dalam pelaksanaan berarti sekolah tersebut telah berhasil melaksanakan Program Sekolah Gratis, jika salah satu atau lebih dari komponen terhadap biaya ataupun pelaksanaan Program Sekolah Gratis yang telah disebutkan tidak terlaksana, maka masih adanya permasalahan pada pelaksanaan kebijakan Program Sekolah Gratis tersebut baik permasalahan tersebut terjadi pada pihak tim manajemen tingkat Provinsi, tim manajemen Kabupaten/Kota, ataupun pada tim manajemen tingkat sekolah yaitu SMA/SMK/MA negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Dari banyaknya jumlah SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta di kota Palembang yang telah ikut melaksanakan kebijakan Program Sekolah Gratis dari tahun 2009 hingga sekarang, maka penelitian ini akan mengambil Sekolah Menengah Atas Negeri dikarenakan telah di jelaskan Pada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 1 yaitu semua sekolah negeri wajib menerima dana PSG. Disini penulis mengambil penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan mengambil contoh dari dua SMA Negeri di kota Palembang yang telah melaksanakan Program Sekolah Gratis, SMA Negeri tersebut yaitu SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri 19 Palembang. SMA Negeri 15 Palembang merupakan SMA di daerah ilir kota Palembang yang memiliki jumlah siswa paling sedikit dan SMA Negeri 19 Palembang merupakan SMA di daerah ulu kota Palembang yang memiliki jumlah siswa paling banyak.

Sebagian Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri 19 Palembang telah berjalan cukup baik, tetapi pelaksanaan Program Sekolah Gratis di

SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri 19 Palembang masih terdapat beberapa permasalahan terhadap proses implementasi-nya. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Sekolah Gratis SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri 19 Palembang adalah karena belum adanya keterbukaan dana Program Sekolah Gratis yang di dapat melalui tim manajemen tingkat Provinsi atau tim manajemen tingkat Kabupaten/Kota yang dananya di salurkan kepada tim manajemen sekolah, bahwa yang seharusnya dana tersebut dapat dilihat para siswa/siswi dengan jumlah penggunaan dana Program Sekolah Gratis di sekolah tersebut yaitu melalui papan pengumuman sekolah dan masih adanya pemungutan biaya ekstrakurikuler yang seharusnya biaya tersebut telah di tanggung di dalam penggunaan dana PSG.

Pada Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan bab IV pasal 20 ayat 3 menjelaskan bahwa pengelolaan dana program sekolah gratis dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mengumumkan besaran dana PSG yang diterima di papan pengumuman sekolah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat melihat kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di SMA Negeri di kota Palembang. Harapan peneliti menginginkan agar hasil penelitian ini bisa berguna untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan ini dan dapat berguna sebagai bahan studi untuk peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Penulisan penelitian ini membahas tentang program sekolah gratis di kota Palembang dan dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian, yaitu :

Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan sekolah gratis tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Palembang tahun 2017-2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan program sekolah gratis di Kota Palembang. sehingga di harapkan penelitian ini mampu memberi solusi dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat kota Palembang, khususnya mengenai pelaksanaan program sekolah gratis pada tingkat SMA/SMK/MA di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan serta menambah pengetahuan yang berguna untuk mengembangkan ilmu administrasi negara dan dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan yang dibuat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan program sekolah gratis di kota Palembang. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak berkepentingan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan program sekolah gratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Said Zainal.2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo .2017. *Dasar- Dasar Kebijakan*. Jakarta : Alfabeta.
- Creswell, John W 2016, *Research Design Pendekatan Metode Kualitati, Kuantitatif, Dan Campuran*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Jones, Charles O. 1977. *An introduction to the study of public policy (third edition)*. Monterey,California : Brooks/cole publishing company.
- Murnadi, Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Nugroho, riant. 2014. *Public policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Purwanto, Erwan Agus , dan Dyah Ratih Sulistyastuti . 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Singarimbun, Masri Dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survey (Editor)*. Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono . 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafiee, Inu Kencana.2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Peraturan Perundangan :

- Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman PenyelenggaraanProgram Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan*
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan*
- Keputusan Gubernur Nomor 198/Kpts/Disdik/2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018*

Sumber lain – lain :

Andriani Nita.2014. *Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis*. Jurnal kebijakan publik (online) vol.5 No.1 (diakses pada 24 Maret 2019)

Nugraha, A.F.2014.*Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) di Kota Serang*. Skripsi ilmu sosial dan ilmu politik (online, diakses pada 24 Maret 2019)

Yusuf, N.F. 2017 *Implementasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung)*. Jurnal Administrasi Negara (Online), Vol.2, NO.1 (diakses pada 24 Maret 2019)